



Kajian Konseptual tentang Negara dan Bangsa dalam Perspektif Ilmu Politik

Conceptual Study of State and Nation from a Political Science Perspective

Resti Wahyu Yuliana¹, Sayful Eka Nofiananta², Gufron Bayu Satria Arno Putra³

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email : edysulistyoedy11@gmail.com¹, sayfulekanofiananta@gmail.com², putragufron61@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 02-01-2026

Revised : 04-01-2026

Accepted : 06-01-2026

Published : 08-01-2026

Abstract

This article examines the conceptual distinction between state and nation from a political science perspective, given that the two terms are often used interchangeably despite having different analytical emphases. This ambiguity in conceptual use can lead to inaccurate interpretations of political issues, particularly those related to identity, legitimacy, and governance. This research employs a literature review with a qualitative descriptive approach, examining political theory literature, Indonesian academic studies, and relevant reports to map the main characteristics of the state, nation, and nation-state. The results indicate that the state can be understood primarily through institutional capacity, sovereignty, and legitimacy, while the nation is rooted in shared imagination, historical memory, symbols, language, and values that shape collective solidarity. The discussion also highlights the role of digital space in shaping national identity and political participation, as well as the risks of disinformation and polarization that can undermine social cohesion. The main contribution of this paper is to offer a more structured conceptual framework for distinguishing and linking the concepts of state and nation, thereby providing a more precise analytical reference in political studies, particularly in the Indonesian context.

Keywords: nation, political science, state

Abstrak

Artikel ini membahas pembedaan konseptual antara negara dan bangsa dalam perspektif ilmu politik, mengingat kedua istilah tersebut kerap digunakan secara bergantian meskipun memiliki penekanan analitis yang berbeda. Kerancuan penggunaan konsep dapat menyebabkan pembacaan yang kurang tepat terhadap persoalan politik, khususnya yang berkaitan dengan identitas, legitimasi, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menelaah literatur teori politik, kajian akademik Indonesia, serta laporan relevan untuk memetakan ciri utama negara, bangsa, dan negara-bangsa. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara terutama dapat dipahami melalui kapasitas kelembagaan, kedaulatan, dan legitimasi, sementara bangsa berakar pada imajinasi kebersamaan, memori sejarah, simbol, bahasa, dan nilai yang membentuk solidaritas kolektif. Pembahasan juga menyoroti peran ruang digital dalam membentuk identitas kebangsaan dan partisipasi politik, sekaligus risiko disinformasi dan polarisasi yang dapat mengganggu kohesi sosial. Kontribusi utama tulisan ini adalah menawarkan kerangka konseptual yang lebih terstruktur untuk membedakan sekaligus mengaitkan konsep negara dan bangsa, sehingga dapat menjadi acuan analitis yang lebih presisi dalam kajian politik, khususnya dalam konteks Indonesia.

Kata Kunci : bangsa, ilmu politik, negara

PENDAHULUAN

Dalam ilmu politik, pembedaan antara negara dan bangsa penting karena keduanya sering dipakai bergantian, padahal titik tekannya berbeda antara aspek kelembagaan dan aspek identitas



kolektif. Memahami dinamika politik kontemporer, termasuk geopolitik, sulit dilakukan tanpa terlebih dulu menata pengertian dasar tentang negara dan bangsa secara jelas (Soepandji, 2019). Di sisi lain, perubahan ruang publik akibat teknologi digital juga mengubah cara identitas nasional dibentuk, diekspresikan, dan dinegosiasikan, sehingga konsep-konsep kebangsaan perlu dibaca ulang secara lebih hati-hati (Manalu et al., 2024). Pada konteks tertentu, persoalan kebangsaan juga tampak sebagai kontestasi tentang “menjadi bagian dari Indonesia” yang tidak selalu berjalan mulus di semua wilayah, sehingga diskusi tentang bangsa tidak bisa dilepaskan dari pengalaman historis dan politik yang beragam (Meteray, 2022).

Dari pemaparan tersebut, masih terlihat beberapa bagian yang belum cukup terjawab dalam kajian-kajian yang ada dan perlu dirapikan melalui pembahasan konseptual yang lebih fokus. Soepandji (2019) menempatkan negara dan bangsa sebagai prasyarat penting untuk membaca geopolitik masa kini, lalu mengulas definisi negara dan nation-state melalui rujukan pemikir hukum dan geopolitik. Namun fokus utamanya adalah bagaimana geopolitik membantu pengambil kebijakan strategis, sehingga pembahasan negara dan bangsa lebih berfungsi sebagai landasan operasional untuk analisis geopolitik, bukan sebagai pemetaan konsep yang membedakan secara tegas atribut negara, bangsa, dan negara-bangsa dalam tradisi ilmu politik. Akibatnya, ruang untuk merumuskan batas konsep, indikator konseptual, serta hubungan logis antar konsep (misalnya kapan “bangsa” menjadi dasar legitimasi “negara”, atau kapan “negara” membentuk “bangsa”) belum disusun sebagai kerangka analitis yang bisa dipakai lintas kasus.

Selanjutnya, Jaya (2019) mengkaji *nation-state* melalui pemikiran politik Melayu Islam abad ke-19 dengan studi atas Abdullah Munsyi, memakai pendekatan kepustakaan dan historis, serta menautkan *nation-state* dengan nasionalisme dan tata kelola pemerintahan. Hal ini kuat untuk menunjukkan jejak gagasan kebangsaan dalam tradisi intelektual tertentu, termasuk cara “bangsa” dipahami sebagai identitas yang menuntut hak ikut menentukan format politik. Tetapi karena mengacu dari satu figur dan satu konteks ideologi, pembahasannya cenderung berhenti pada pembacaan historis dan relevansi normatif, belum mengurai perbedaan konsep negara dan bangsa sebagai kategori analitis ilmu politik yang dapat digunakan untuk membandingkan berbagai konteks Indonesia yang majemuk, termasuk ketika identitas kebangsaan beririsan dengan kewargaan, kedaulatan, dan institusi negara modern.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembahasan yang lebih rapi agar istilah negara dan bangsa tidak terus dipakai secara campur-aduk dalam analisis politik. Secara praktis, kerancuan istilah dapat membuat pembacaan masalah politik menjadi kurang tepat, misalnya ketika persoalan identitas dianggap semata urusan “bangsa” padahal terkait juga dengan cara negara bekerja, atau ketika isu kedaulatan dibahas hanya sebagai urusan “negara” tanpa memperhatikan basis identitas dan penerimaan sosial sebagai “bangsa”.

Dengan latar tersebut, penelitian ini menawarkan arah pembahasan yang lebih terstruktur untuk menempatkan negara dan bangsa sebagai dua konsep yang berhubungan tetapi tidak identik, sekaligus menegaskan sasaran kajiannya. Penelitian ini menyusun kajian konseptual yang memetakan definisi kerja, ciri utama, serta hubungan analitis antara negara, bangsa, dan negara-bangsa dalam perspektif ilmu politik dengan bertumpu pada perdebatan yang sudah muncul dalam kajian Indonesia. Pada akhirnya, kajian ini diharapkan membantu diskusi akademik menjadi lebih



presisi karena membedakan apa yang dimaksud sebagai negara, apa yang dimaksud sebagai bangsa, serta kapan keduanya bertemu dalam bentuk negara-bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, dan dokumen ilmiah yang relevan untuk membahas konsep negara dan bangsa dalam perspektif ilmu politik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur, kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik dan kedalaman pembahasan. Analisis dilakukan dengan membaca secara sistematis, mengidentifikasi konsep kunci, membandingkan definisi dan argumen antar sumber, lalu menyusun sintesis konseptual yang runtut agar perbedaan serta hubungan antara negara, bangsa, dan negara-bangsa dapat dijelaskan secara jelas dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara dalam Perspektif Ilmu Politik

Dalam ilmu politik, negara umumnya dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang bekerja lewat lembaga, hukum, dan kebijakan untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah, sekaligus menjaga keteraturan dan kepentingan nasional di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berubah (Budiardjo et al., 2023). Dalam konteks geopolitik, pemahaman tentang negara tidak bisa dilepaskan dari cara negara membaca ancaman dan peluang, lalu menerjemahkannya menjadi keputusan publik yang berdampak luas, mulai dari keamanan, ekonomi, sampai tata kelola pemerintahan (Buzan and Wæver, 2003). Soepandji (2019) menekankan bahwa konsep negara dan bangsa tetap penting karena interaksi antaraktor makin tinggi dan konsekuensi kebijakan strategis makin besar, sehingga negara dituntut punya kapasitas mengelola kepentingan secara rasional dan terukur.

Secara operasional, negara terlihat dari tiga hal yang saling terkait. Pertama, legitimasi, yaitu penerimaan warga terhadap kewenangan negara untuk membuat keputusan dan menjalankannya (Gilley, 2006). Kedua, kedaulatan, yaitu kemampuan negara menjalankan otoritas di wilayahnya tanpa mudah didikte oleh kekuatan lain (Krasner, 1999). Ketiga, kapasitas kelembagaan, yaitu apakah negara punya institusi yang efektif, akuntabel, dan mampu menegakkan aturan (Besley and Persson, 2009). Jika salah satu lemah, negara bisa tetap “ada” secara formal, tetapi performanya rapuh dalam mengelola konflik, menegakkan hukum, dan menyediakan layanan publik.

Kapasitas kelembagaan ini bisa dibaca lewat indikator demokrasi yang memotret praktik kebebasan sipil, kesetaraan, serta kualitas lembaga demokrasi. BPS menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan tiga aspek utama, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Pada level nasional, capaian IDI 2023 dilaporkan sebesar 79,51 poin (Isnur, 2025). Angka ini membantu menunjukkan bahwa demokrasi dan kualitas institusi tidak bisa hanya dinilai dari ada tidaknya pemilu, tetapi juga dari seberapa sehat praktik kebebasan, kesetaraan politik, serta daya kerja lembaga demokrasi yang mengawal keputusan publik.

Implikasinya, kajian tentang negara dalam ilmu politik tidak cukup berhenti pada definisi normatif seperti “negara itu berdaulat dan punya hukum”. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana negara bekerja dalam situasi konkret. Misalnya, ketika prosedur demokrasi berjalan,



tetapi kapasitas lembaga masih belum merata, maka kebijakan publik berpotensi tidak konsisten, penegakan aturan bisa berbeda-beda, dan kepercayaan publik mudah turun. Karena itu, membahas negara perlu menggabungkan sisi konsep dan sisi kinerja, agar analisisnya tidak abstrak dan bisa menjelaskan mengapa dalam kasus tertentu negara terlihat kuat, tetapi pada isu lain negara tampak lamban atau tidak tegas.

Terakhir, konsep negara juga relevan saat dibaca bersama gagasan negara modern yang menuntut pemerintahan yang sah, batas wilayah yang jelas, dan pengakuan, serta menempatkan tata kelola sebagai syarat penting agar negara tidak sekadar kuat secara simbolik, tetapi juga bersih dan dapat dipertanggungjawabkan (Jaya, 2019).

Bangsa dan Dinamika Kebangsaan dalam Ruang Politik Kontemporer

Berbeda dari negara yang lebih mudah dilihat lewat institusi dan hukum, bangsa lebih dekat pada ikatan politik dan identitas kolektif yang membuat masyarakat merasa “kita”. Dalam ilmu politik, bangsa berhubungan dengan imajinasi kebersamaan, memori sejarah, simbol, bahasa, serta nilai yang membentuk solidaritas (Anderson, 1991). Ikatan ini penting karena legitimasi negara tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh apakah warga merasa menjadi bagian dari komunitas politik yang sama, dan apakah perbedaan sosial bisa dikelola tanpa merusak rasa kebersamaan.

Kekuatan ikatan kebangsaan dapat dilihat dari partisipasi politik warga dalam kanal formal, terutama pemilu. Dalam dokumen KPU terkait pengguna hak pilih Pemilu 2024, tercatat jumlah nasional pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan tingkat pengguna hak pilih sebesar 81,50% (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024). Angka nasional ini penting karena menggambarkan keterlibatan warga dalam menentukan kepemimpinan, yang pada dasarnya menjadi salah satu “lem” utama antara warga, bangsa, dan negara. Namun data yang sama juga menunjukkan variasi antardaerah, misalnya DKI Jakarta tercatat 78,78%, sementara D.I. Yogyakarta 88,88%. Variasi ini dapat dibaca sebagai perbedaan konteks sosial-politik lokal, kualitas mobilisasi politik, serta akses warga terhadap informasi dan fasilitas demokrasi.

Pada saat yang sama, kebangsaan hari ini dibentuk kuat oleh ruang digital. APJII melaporkan pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan penetrasi 79,5% (APJII, 2024). Artinya, diskusi publik, kampanye politik, produksi identitas, dan bahkan konflik wacana sangat banyak terjadi di platform digital. Ini membuat “bangsa” tidak hanya dibangun melalui sekolah, organisasi sosial, atau media arus utama, tetapi juga melalui arus konten harian yang dikonsumsi dan diproduksi warga, termasuk oleh kelompok muda yang dominan di ekosistem internet.

Di sisi lain, ruang digital juga membawa risiko serius bagi kohesi kebangsaan, terutama lewat disinformasi dan polarisasi. Kemkomdigi disebut mengidentifikasi dan mengklarifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang 2024, dengan rincian temuan bulanan yang bervariasi (Rochman, 2025). Mafindo juga mencatat hoaks politik pada 2023 sebanyak 1.292 kasus, dan 645 di antaranya terkait Pemilu 2024 (Rizaldi, 2024). Data ini menunjukkan bahwa kontestasi politik modern bukan hanya kompetisi program, tetapi juga kompetisi narasi, termasuk narasi yang sengaja dibentuk untuk memecah kepercayaan dan memperbesar konflik identitas. Jika dibiarkan, situasi seperti ini bisa mengganggu dua hal sekaligus, yakni kualitas pilihan politik warga dan rasa “kita” sebagai bangsa.



Karena itu, membahas bangsa dalam perspektif ilmu politik perlu menempatkan identitas kebangsaan sebagai arena politik yang hidup, bukan sekadar slogan. Bangsa yang kuat bukan berarti tanpa perbedaan, tetapi mampu mengelola perbedaan melalui partisipasi, literasi politik, dan aturan main yang adil. Pada titik ini, pembahasan bangsa juga bertemu dengan tuntutan tata kelola, sebab identitas kebangsaan yang sehat biasanya tumbuh ketika warga melihat negara bekerja transparan, membuka partisipasi, dan menjalankan pertanggungjawaban publik secara nyata.

KESIMPULAN

Pembedaan konsep negara dan bangsa perlu ditegaskan agar analisis politik tidak keliru membaca persoalan identitas, kedaulatan, dan cara kerja institusi, karena kerancuan istilah dapat membuat masalah politik dibahas tidak tepat dan memutus keterkaitan antara aspek kelembagaan dan aspek identitas kolektif. Negara dapat dibaca terutama melalui legitimasi, kedaulatan, dan kapasitas kelembagaan, sehingga penilaian terhadap politik tidak cukup berhenti pada definisi formal, tetapi harus melihat apakah institusi efektif, akuntabel, dan mampu menjalankan aturan serta layanan publik. Pada saat yang sama, pembentukan kebangsaan semakin kuat dipengaruhi ruang digital, sehingga produksi identitas, diskusi publik, dan kontestasi politik banyak berlangsung di platform daring, namun kondisi ini juga membawa risiko disinformasi dan polarisasi yang dapat mengganggu kohesi sosial dan kualitas pilihan politik warga. Karena itu, kontribusi utama tulisan ini adalah menawarkan kerangka konseptual yang menempatkan negara dan bangsa sebagai dua konsep yang berhubungan tetapi tidak identik, sehingga dapat dipakai sebagai pegangan istilah dan alat baca yang lebih konsisten untuk penelitian lanjutan, khususnya saat membahas legitimasi, kedaulatan, kewargaan, dan identitas kolektif dalam konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. R. O. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.

APJII. (2024). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. Retrieved from APJII website: <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Besley, T., and Persson, T. (2009). The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics. *American Economic Review*, 99(4), 1218–44. <https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1218>

BPS Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2023*. Semarang.

Budiardjo, M., Soeseno, N., and Evaquarta, R. (2023). Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep. In *Pengantar Ilmu Politik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Buzan, B., and Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge University Press.

Gilley, B. (2006). The meaning and measure of state legitimacy: Results for 72 countries. *European Journal of Political Research*, 45(3), 499–525. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00307.x>

Isnur, P. (2025). Sudah Sejauh Mana Tingkat Demokrasi di Indonesia? Retrieved from Indonesia Baik.id website: <https://indonesiabaik.id/infografis/sudah-sejauh-mana-tingkat-demokrasi-di-indonesia>

Jaya, A. C. (2019). Konsep Nation-State Dalam Pemikiran Ideologi Politik Melayu Islam Pada



Abad Ke-19 M (Studi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854)). *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.3684>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Indeks Partisipasi Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jakarta.

Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton University Press.

Manalu, D. K., Bukit, D. G. B., and Hutabarat, M. (2024). Identitas Nasional Dan Nasionalisme Di Era Digital: Dalam Kajian Kewarganegaraan. *Jagaddhita*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v4i1.3650>

Meteray, B. (2022). Kontestasi Nasionalisme Indonesia Pada Tiga Daerah Penyemaian Di Papua. *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 48(1), 47–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1180>

Rizaldi, B. A. (2024). Mafindo catat hoaks politik meningkat dibanding pemilu lalu. Retrieved from ANTARA website: <https://www.antaranews.com/berita/3944460/mafindo-catat-hoaks-politik-meningkat-dibanding-pemilu-lalu>

Rochman, F. (2025). Kemkomdigi identifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang 2024. Retrieved from ANTARA website: <https://www.antaranews.com/berita/4570934/kemkomdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-2024>

Soepandji, K. W. (2019). Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 37, 41–58.